

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris di BPPKAD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024)

Shufi Aulia^{1*}, Romandhon², Susanti³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas sains Al Qur'an

Email: romandhon@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Metode - Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan sampel berjumlah 72 pegawai di BPPKAD Kabupaten Wonosobo dan di dapat dengan teknik pengambilan simple random sampling.

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAKD dan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara kompetensi SDM dan pemanfaatan TI tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Implikasi - Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan sistem dan standar akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta perlunya penguatan kompetensi SDM dan Teknologi Informasi.

Orisinalitas - Makalah ini melihat hubungan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonoosbo. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perkembangan Kabupaten Wonosobo melalui kualitas laporan keuangannya.

Kata kunci: Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah, Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan.

Pendahuluan

Indikator terpenting dalam tata kelola suatu daerah adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Kualitas laporan keuangan seharusnya tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kabupaten Wonosobo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun, namun masih terdapat beberapa rekomendasi perbaikan dari BPK serta penyimpangan antara anggaran dan realisasi belanja, yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan masih belum optimal.

Gambar 1. Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Transfer TA 2021 s/d 2023

No	TA		Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase
	Pendapatan	Belanja dan Transfer			
1.	2021		2,026,673,175,551.00	1,860,097,990,936.00	91,78%
2.	2022		2,128,866,682,105.00	2,011,113,250,458.00	94,47%
3.	2023		2,210,013,276,667.00	2,105,985,875,749.00	95,29%

Gambar 1 menunjukkan anggaran belanja dan realisasi rencana Kabupaten Wonosobo tahun 2021–2023, di mana realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah disepakati sebelumnya. Dalam tiga tahun tersebut, belanja dan transfer Kabupaten Wonosobo mengalami pertumbuhan. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD, rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu menyusun rencana anggaran dengan baik dan belum menunjukkan kemampuan dalam merealisasikan anggarannya. Sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan harus memuat realisasi anggaran, yang menunjukkan kesesuaian antara anggaran yang dicatat dengan realisasi yang terjadi.

Dini Dwiyan (2021) "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (Studi Empiris di BPKAD Kabupaten Bogor) menjadi dasar dari penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, penggunaan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Namun, dalam penelitian ini, variabel Sistem Pengendalian Internal diganti dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai variabel independen. Menurut Istiqomah Shinta Philadelpia dkk. (2020), penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, perubahan ini dilakukan. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ayu Safridha (2020) menemukan bahwa kompetensi SDM berkorelasi positif dengan kualitas laporan keuangan daerah. Studi yang dilakukan oleh Dini Dwiyan (2021) juga menunjukkan bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah lebih baik karena sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah, dan teknologi informasi yang digunakan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, studi ini meneliti opini WTP yang telah diberikan oleh BPK terkait kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama beberapa tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun BPK telah memberikan saran, masih terdapat permasalahan pada realisasi belanja dan transfer yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kajian Pustaka

Agency Theory

Teori keagenan mendasari laporan keuangan organisasi sektor publik sebagaimana dinyatakan oleh Faristina (2011) dalam Munifah (2020). Sebagai agen, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang berguna dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak-pihak yang mengandalkannya untuk menilai akuntabilitas serta merumuskan pendapat yang tepat dalam hal ekonomi, sosial, dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai aktivitasnya. Dalam tata kelola yang demokratis, hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan pemerintah disebut sebagai hubungan keagenan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan kumpulan dari laporan-laporan keuangan suatu entitas dalam periode waktu tertentu yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana disampaikan oleh Mahmudi (2016) dan Dini Dwiyani (2021). Selain itu, pengelolaan keuangan juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Karena memiliki manfaat bagi para penggunanya, laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kompetensi kerja adalah kemampuan setiap individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Menurut Ramadhani dkk (2019), kompetensi SDM adalah proses pencapaian tujuan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan kemampuan dan kapasitas unik yang dimiliki oleh setiap individu. Kompetensi sumber daya manusia mengacu pada kemampuan yang dimiliki seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar dapat mencapai tujuan keuangan yang diharapkan.

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien disebut kompetensi sumber daya manusia.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur untuk melaporkan keuangan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, termasuk pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pengikhtisaran. Prosedur ini dapat dilakukan secara manual atau melalui aplikasi komputer.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai laporan keuangan pemerintah. Standar pemerintahan ini dituangkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dasar dari standar ini adalah kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

Semua pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan dan penyusunan laporan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat, serta lembaga terkait lainnya, harus memahami standar akuntansi pemerintahan. Seluruh kebijakan pemerintah harus dilaksanakan, namun untuk mencapainya terlebih dahulu harus memahami secara menyeluruh landasan pemikiran yang penting guna menunjang akuntansi pemerintahan.

Teknologi Informasi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi adalah metode

pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, publikasi, analisis, dan penyebaran informasi.

Pelaporan keuangan didukung oleh teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan kombinasi antara teknologi komputer dan komunikasi yang mencakup sistem perangkat keras maupun perangkat lunak. Sistem ini dapat digunakan untuk menganalisis, mengevaluasi, memperoleh, mengolah, dan memanipulasi berbagai jenis data guna menghasilkan data yang berkualitas tinggi. Teknologi informasi dapat membantu proses penyusunan rencana strategis dengan menyediakan data yang tepat waktu, akurat, dan relevan.

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut penelitian Mutia Aulia Safridha (2020), pengembangan keterampilan SDM memiliki dampak positif terhadap kualitas LKPD di BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, penelitian oleh Irafah dan Sari (2020) juga menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sebaliknya, penelitian oleh Istiqomah Shinta Philadhelphia, Sri Suryaningsum, dan Sriyono (2020) menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan SDM juga berdampak positif terhadap kualitas LKPD.

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo akan menjadi lebih baik jika disusun oleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.

Pengaruh SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dini Dwiyani (2021) menyatakan bahwa SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di BPKAD Kabupaten Bogor; Enita Binawati (2022) menyatakan bahwa SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Klaten; dan Sri Rahayu serta Alfaniha Dewi Kanita (2023) menyatakan bahwa SAKD tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Bogor.

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo akan menjadi lebih baik dengan penerapan SAKD yang baik, yaitu pelaporan, pengikhtisaran, dan pencatatan yang benar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah: H2: Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.

Pengaruh SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Philadhelphia dkk, (2020), membuktikan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Dini Dwiyani (2021), membuktikan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD pada BPKAD Kabupaten Bogor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahartini dkk, (2021), membuktikan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Karangasem.

Penggunaan SAP adalah bagian penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; memiliki pemahaman tentang standar ini akan memungkinkan Anda membuat laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip yang sangat penting bagi pemerintah. Ada kemungkinan bahwa laporan

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo akan lebih baik dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang baik, yaitu berbasis akrual dan memiliki semua elemen laporan keuangan. Dari penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPPKAD Kabupaten Wonosobo

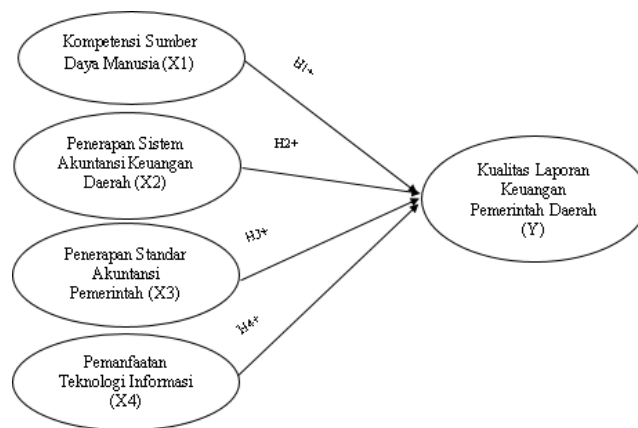
Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut penelitian Apriansya dkk. (2020), penggunaan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Bungo. Menurut Ridzal dkk. (2022), penggunaan TI juga berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Buton Selatan. Sebaliknya, penelitian oleh Lantu dkk. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan TI tidak secara signifikan meningkatkan kualitas LKPD di Kabupaten Minahasa.

Pemerintah pusat dan daerah harus memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengetahuan publik dan efisiensi keuangan. Hal ini akan meningkatkan kecepatan dan ketepatan transaksi keuangan serta membantu menyediakan informasi berkualitas tinggi yang mendukung pengambilan keputusan. Terdapat bukti bahwa laporan keuangan di wilayah Kabupaten Wonosobo akan menjadi lebih baik jika teknologi informasi yang baik—yaitu perangkat, pengelolaan data keuangan, dan perawatan—digunakan secara efektif. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPPKAD Kabupaten Wonosobo

Gambar 2. Model Penelitian



Sumber data primer, diolah 2025

Metodologi Penelitian

Populasi penelitian terdiri dari pegawai BPPKAD Kabupaten Wonosobo, dengan total 88 pegawai. Sampel diambil menggunakan metode simple random sampling, menghasilkan 72 orang yang menjawab. Data awal dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada mereka yang menjawab. Menurut Ghazali (2018), analisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh antara variabel independen dan dependen. Hipotesis diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis diterima jika nilainya kurang dari 0,05, dan ditolak jika nilainya lebih besar (Ghozali, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengalaman kerja, pemahaman akuntansi, dan sistem pengendalian internal. Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS ditampilkan dalam tabel.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.122	3.056		3.312	.001
SDM	-.010	.098	-.008	-.100	.921
SAKD	.688	.181	.430	3.793	.000
SAP	.291	.071	.421	4.096	.000
TI	.070	.105	.063	.666	.508

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: data SPSS yang diolah, 2025

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 1 menunjukkan bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan H1 menyatakan bahwa SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah Shinta Philadelphia dkk. (2020), yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai tidak selalu berdampak negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini terutama terjadi apabila tidak terdapat pengawasan, sistem kerja, atau pegawai yang memiliki pengetahuan memadai.

Menurut Mutia Aulia Safarida (2020) dan Chamawati & Romandhon (2021), kompetensi SDM dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa kompetensi kerja seseorang adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun pegawai di BPPKAD merasa kompeten, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya evaluasi kinerja pegawai yang belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan, sehingga meskipun pegawai memiliki kompetensi yang memadai, hal tersebut tidak diikuti dengan pengukuran dan pengawasan kinerja yang optimal. Kurangnya penilaian kinerja yang objektif dan terstruktur dapat menghambat pemanfaatan kompetensi secara efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penempatan bidang pegawai di BPPKAD juga belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai sehingga menyebabkan kinerja SDM yang kurang maksimal, sehingga memerlukan evaluasi

kinerja secara maksimal, penguatan program mentoring atau pendidikan dan pelatihan serta sinkronisasi kompetensi individu dengan sistem kerja agar kompetensi SDM selaras dengan prosedur dan target kualitas pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menemukan bukti untuk menunjukkan bahwa kompetensi SDM memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 1 menunjukkan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan; H2 menunjukkan hubungan positif antara sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Menurut Dini Dwiyani (2021) dan Enita Binawati (2022), SAKD dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Mencatat, mengelompokkan, menafsirkan, meringkas, dan melaporkan transaksi ekonomi, termasuk keuangan provinsi, kabupaten, atau kota, adalah bagian dari sistem akuntansi keuangan daerah (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002). Proses ini menghasilkan informasi yang membantu menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa prosedur penulisan pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 232 yang terdiri dari pentacatatan dan penggolongan, pengikhtisarian atau peringkasan dan pelaporan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan di BPPKAD telah membantu proses pelaporan secara akurat dan tepat waktu, aplikasi yang terkomputerisasi dan alur yang sesuai dengan prinsip akuntansi memperkecil risiko kesalahan sehingga meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo terbukti dalam penelitian ini

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hubungan antara standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah ditunjukkan dalam Tabel 1; hubungan antara standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah di daerah yang diteliti ditunjukkan dalam H3. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Dwiyani (2021) dan Desy Dwi Rachmawati (2020) juga menunjukkan bahwa SAP berperan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas LKPD.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan dasar akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan mengelola laporan keuangan pemerintah. Standar ini didasarkan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan dituangkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat dua belas pernyataan yang menjadi indikator standar dalam akuntansi pemerintahan. Hipotesis yang dikembangkan dan dirumuskan oleh Dini Dwiyani (2021) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji variabel tersebut.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa di BPPKAD dalam penyusunan laporan keuangannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang disajikan dalam pernyataan standar akuntansi dan disusun secara konseptual dalam hal ini mencakup tentang penyajian data, laporan relasi anggaran,

laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, laporan keuangan konsolidasian dan laporan operasional. Maka menghasilkan suatu penyajian laporan yang andal, relevan, dan sesuai standar. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo terbukti dalam penelitian ini.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 1 menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sedangkan H4 menunjukkan bahwa sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fransiska Tirza Lantu dkk (2023) dan Christina Loe dkk, (2022) bahwa TI tidak selalu berdampak langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian oleh Muniifah Anaan (2020) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik (PP No. 56 Tahun 2005).

Hasil ini membuktikan bahwa berkembangnya teknologi informasi belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Teknologi informasi yang mencakup perangkat komputerisasi, pengelolaan data dan perawatan memerlukan pelatihan dan pengalaman serta keahlian tersendiri. Terbukti bahwa responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Namun, dalam penerapan dan pemahaman tentang teknologi informasi karyawan BPPKAD masih minim. Dapat dilihat juga dari perangkat yang tersedia di BPPKAD seperti ada beberapa perangkat keras ataupun lunak yang rusak atau eror sehingga tidak berfungsi secara optimal yang menyebabkan gangguan operasional dan dapat menghambat ketepatan waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang kurang optimal, hal ini memerlukan evaluasi dan pembaruan sistem TI secara berkala agar sistem tetap relevan dengan kebutuhan dan regulasi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo tidak terbukti dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834 ^a	.695	.677	2.730

a. Predictors: (Constant), SDM, SAKD, SAP, TI

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 2. menunjukkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,677. Hal ini, menunjukkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Teknologi Informasi sebesar 67,7% sedangkan sisanya 32,3% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diteliti dalam

penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pegawai merasa memiliki kompetensi yang cukup dalam bidangnya, namun belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Kemungkinan kompetensi yang dimiliki belum diterapkan secara maksimal atau belum didukung oleh sistem kerja yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih baik.
2. Hipotesis 2 yang menyatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi yang digunakan, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem yang terstruktur, terkomputerisasi, dan sesuai standar akuntansi membantu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan tepat waktu.
3. Menurut Hipotesis 3, penerapan standar akuntansi pemerintah berdampak positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, menerapkan SAP yang sesuai dengan peraturan pemerintah sangat penting untuk membuat laporan keuangan yang memenuhi kualitas seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
4. Hipotesis 4 ditolak, yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berdampak positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digunakan secara signifikan, ia masih belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kemungkinan pemanfaatan teknologi belum dioptimalkan atau tidak dikombinasikan dengan peningkatan kemampuan pengguna untuk mengoperasikan sistem yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, H. (2019). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Binawati, E. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 19.
- Cahmawati, Romandhon (2021). Pengaruh Peran Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Wonosobo Periode 2016-2018)
- Dewi, M., & Nilasari, A. P. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(1), 1–9.
- Dwiyani, D. (2020). Faktor-Faktornyang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Bogor). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan*.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Irafah, S., & Sari, E. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan KEUANGAN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Jauhari, H., Dewata, E. D., & Suhairi Hazisma. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104–121.
- Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 91–97.
- Pavitasari, (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
- Philadelphphia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-Iscan: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22.
- Rahmat Cahya Ramadhan (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten)
- Safridha, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Bpkad Provinsi Sumatera Utara). *Program Studi Akuntansi Syariah*.
- Sugiyono, D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
Website resmi BPK RI: <https://www.bpk.go.id>
Website BPK Perwakilan Jateng: <https://jateng.bpk.go.id>